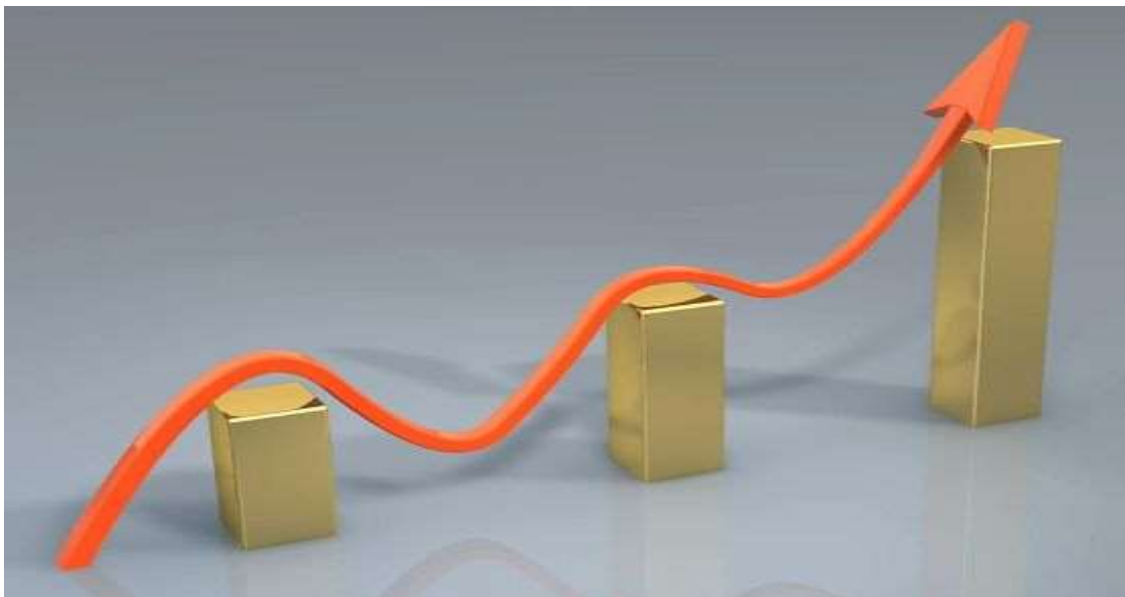




Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

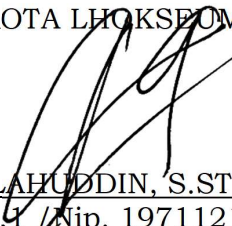
Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Sesuatu yang sangat dinantikan untuk dirasakan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performanceachievement*) Organisasi Perangkat Daerah. Laporan ini juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Lhokseumawe khususnya di Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 .

Diharapkan LAKIP Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKESEUMAWE


SALAHUDDIN, S.ST, M.S.M
Pembina Tk.4 /Nip. 19711212200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi.....	2
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1 Pengukuran Kinerja.....	10
BAB IV - PENUTUP.....	19

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang handal termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe. Dasar hukum mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Perangkat Daerah merupakan Organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dibidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana, Perencanaan Keistimewaan Aceh dan sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, serta Perencanaan Program Pembangunan Daerah

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Perencana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, bertugas membantu Walikota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2020 adalah sebagai penjabaran dari Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah **“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA dan Mou Helsinki”**. yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisiikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok BAPPEDA adalah membantu Walikota dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe;

4. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), dan membina Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan di Kota Lhokseumawe;
9. Pembinaan UPT; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - Sub Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan;

- Sub Bidang pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh.
- Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan sosial
- b. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - Sub Bidang Praswil dan Perumahan
 - Sub Bidang Pengembangan Wilayah
 - Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenaga Kerjaan;
 - Sub Bidang Industri Perdagangan, pariwisata;
 - Sub Bidang pengembangan Usaha dan Investasi.
 - Sub Bidang Ketahanan Pangan
- d. Bidang Penelitian Dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - Sub Bidang Pengembangan Inovasi;
- e. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
 - Sub Bidang Penyusunan Program Pendanaan APBK dan pelaporan;
 - Sub Bidang Evaluasi dan pengendalian Pengembangan Pembangunan;
 - Sub Bidang Pendanaan Non APBK dan Kerjasama Pembangunan;

Sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 sebanyak 85 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kota Lhokseumawe Per 31 Desember 2020

Rincian	Uraian	Jumlah Pegawai	
Jabatan	Struktural	24	Orang
	Non-Struktural	0	Orang
Jumlah		24	Orang
Eselon	II	1	Orang
	III	6	Orang
	IV	17	Orang
	Non Eselon	28	Orang
Jumlah		52	Orang

Golongan	IV	7	Orang
	III	41	Orang
	II	4	Orang
Jumlah		52	Orang
Pendidikan	S2	12	Orang
	S1	36	Orang
	DIII	3	Orang
	SLTA	2	Orang
	SLTP	-	Orang
	SD	-	Orang
Jumlah		52	Orang
Status Pegawai	PNS	47	Orang
	CPNS	5	Orang
	Honor	1	Orang
	Bakti	9	Orang
	THL	20	Orang
Jumlah		82	Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian BAPPEDA Kota Lhokseumawe, Januari 2021

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini
2. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. membandingkan realiasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- I. Renstra
- II. IKU
- III. Perjanjian Kinerja
- IV. Pengukuran Kinerja
- V. RKT

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Penetapan/Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe telah membuat penetapan kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi pada tiap-tiap bagian dan bidang. Penetapan kinerja ini akan menjadi tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe 2017-2022. Untuk lebih detailnya mengenai Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2020, dapat dilihat pada lampiran I.

Ikhtisar program dan kegiatan yang terdapat pada perjanjian kinerja 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar daerah
- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pembangunan Taman dan Halaman Kantor

3. Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. Program Pengembangan Data/Informasi

- Pembinaan dan Pengembangan Website Bappeda
- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
- Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)
- Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum GIS

7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

- Penyusunan Rencana Pembangunan Penyehatan Lingkungan Environmental Health Risk Assesment (EHRA)

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)
- Updating Buku Putih Kota Lhokseumawe
- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)

- Revisi RPJMD Kota Lhokseumawe
- Monitoring Pemukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)
- Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK
- Verifikasi Renstra SKPK Lhokseumawe
- Verifikasi Renja SKPK Lhokseumawe
- Verifikasi Perubahan Renja SKPK Lhokseumawe
- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lhokseumawe
- Manajemen E-Planning Kota Lhokseumawe

9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan
- Penyusunan Indeks Kesulitan Geografis

11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- Penanganan Lingkungan Perumahan Kumuh Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

12. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan

- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan OTSUS Kota Lhokseumawe
- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe

13. Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah

- Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Lhokseumawe

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran Kinerja merupakan perbandingan antara target dengan realisasinya. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang buruk. Perbandingan target dengan realisasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini
2. membandingkan antara target dan realiasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. membandingkan realiasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
5. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2020

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Kategori Hasil Evaluasi - SAKIP	CC	BB	100%
		Keterbukaan informasi - publik melalui website	ADA	ADA	100%
		Cakupan koordinasi - Kerjasama perencanaan pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		- Cakupan penyediaan	1	1	100%

LAKIP BAPPEDA KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN 2020

N O	SASARAN STRATEGI S	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	CAPAI AN KINER JA
1	2	3	4	5	6
		dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Dokumen	Dokumen	
		Cakupan penyediaan dokumen perencanaan - pengembangan kota menengah dan besar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
		Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
		Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Cakupan penyediaan laporan koordinaasi - pendanaan pembangunan daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
Tingkat Pencapaian Kinerja = (Realisasi/Rencana) x 100%					100%

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja untuk kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 adalah sebagai Berikut :

1. Sasaran Strategis Pertama yaitu : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara optimal, meningkatkan pengelolaan anggaran yang mengarah kepada peningkatan kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, meningkatkan Kelancaran Kinerja Aparatur perencana melalui Penyediaan sarana dan prasarana aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur serta meningkatkan sumber daya aparatur perencana. Indikator dan Target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan realisasi lebih bagus dari target yang diharapkan yaitu dari target CC Realisasi BB. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator kinerja ini tercapai sebesar 100%.
- b. keterbukaan informasi publik melalui website dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu ada. Dengan demikian capaian Kinerja pada indikator kinerja ini tercapai sebesar 100%.
- c. cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 5 Dokumen. dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- d. cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh dengan realisasi sesuai dengan target yang di harapkan yaitu 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- e. cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- f. cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 3 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.

- g. Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 9 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- h. Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- i. Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- j. Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 12 bulan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini tercapai 100%.
- k. Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah dengan realisasi sesuai dengan target kinerja yang diharapkan yaitu 4 Laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2020 dengan 1 (satu) sasaran mencapai 100%.

Pada tahun 2020 ini, Bappeda Kota Lhokseumawe dapat mencapai semua target kinerja sebagaimana yang diharapkan. Di harapkan dapat mempertahankan untuk tahun-tahun mendatang. Perencanaan yang lebih matang dan antisipasi terhadap dinamika perubahan selama masa pelaksanaan anggaran adalah hal-hal yang patut mendapat perhatian di masa yang akan datang.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan

dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akuntabilitas Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2020

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran : 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentas e (%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	807,015,000	708,675,381	8,6
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,750,000	3,427,500	8,6
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216,400,000	159,700,106	26,2
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	133,315,000	131,594,000	1,3
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,000,000	39,999,325	0,0
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,000,000	21,000,500	30,0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,000,000	22,799,000	0,9
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,400,000	100,0
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	29,081,000	3,1
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah	130,000,000	127,743,000	1,7
	- Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	198,150,000	170,930,950	13,7
2	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR	177,624,466	155,744,450	20,4
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,985,000	3,220,000	75,2
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	39,600,000	33,104,400	16,4
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	60,181,050	55,685,650	7,5
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan	58,100,000	57,039,400	1,8

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentas e (%)
1	2	3	4	5
	Perlengkapan Kantor			
	- Pembangunan Taman dan Halaman	6,758,416	6,695,000	0,9
3	PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KERJA	829,900	700,900	15,5
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah	829,900	700,900	15,5
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA /INFORMASI	207,166,500	134,656,200	30,7
	- Pembinaan dan pengembangan Website Bappeda	36,000,000	34,572,800	4,0
	- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	65,000,000	11,036,300	83,0
	- Pelaksanaan Pelaporan Sistem Informasi Monitoring TEPR (SISMONTEP)	59,000,000	57,571,600	2,4
	- Pelatihan Aplikasi Penggunaan Quantum Gis	47,166,500	31,475,500	33,3
5	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	131,676,132	101,208,000	23,1
	- Penyusunan Rencana pembangunan Penyehatan lingkungan environmental Health Assesment (EHRA)	131,676,132	101,208,000	23,1
6.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,203,472,800	983,978,614	25,1
	- Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	133,279,100	113,432,180	14,9
	- Penyusunan, Monitoring, Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	40,645,000	2,685,000	93,4
	- Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	112,188,100	102,235,000	93.1
	- Evaluasi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM)	62,700,000	59,440,000	8,9

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentas e (%)
1	2	3	4	5
	- Updating buku putih kota lhokseumawe	83,845,200	61,820,200	5,2
	- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)	87,000,000	68,785,600	26,3
	- Revisi RPJM di Kota Lhokseumawe	79,470,000	47,584,700	20,3
	- Monitoring Pemukiman dan Perumahan Kumuh (Operasional Pokjanis RKP-KP)	153,054,500	123,625,300	40,1
	- Perencanaan dan Monitoring Kegiatan DAK	199,700,000	97,555,000	19,2
	- Verifikasi Renstra SKPK Kota Lhokseumawe	28,455,900	611,300	3,2
	- Verifikasi Renja SKPK Kota Lhokseumawe	53,071,300	50,047,900	97,9
	- Verifikasi Perubahan RENJA SKPK Kota Lhokseumawe	34,912,200	33,548,200	5,7
	- Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) SKPK Lhokseumawe	69,051,500	63,548,234	3,9
	- Manajemen e- Planning kota lhokseumawe	165,000,000	159,060,000	8,0
7	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	87,700,000	80,747,525	7,9
	- Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	87,700,000	80,747,525	7,9
8	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	82,013,900	76,961,300	6,0
	- Validasi Data Pendukung Perencanaan Bidang Pendidikan	40,181,950	40,167,550	0,0
	- Penyusunan indeks kesulitan geografis	41,831,950	36,793,750	12,0
9	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	155,837,400	119,313,500	24,0
	- Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)	72,994,400	48,865,500	33,1
	- Penanganan lingkungan perumahan kumuh pemukiman kumuh berbasis kawasan (PLT2K-BK)	82,843,000	70,448,000	15,0

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentas e (%)
1	2	3	4	5
10	PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	145,000,000	131,437,775	9,7
	- Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian, TDBH Migas dan Otsus Kota Lhokseumawe	90,000,000	82,445,325	8,4
	- Penyusunan perencanaan dan pengendalian APBA dan APBN Kota Lhokseumawe	55,000,000	48,992,450	10,9
11	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	50,000,000	44,346,500	11,3
	- Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan	50,000,000	44,346,500	11,3
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,188,685,000	3,910,987,606	6,6
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	3,048,336,098	2,537,770,145	18,6
	TOTAL BELANJA	7,237,021,098	6,448,757,751	12,6

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 adalah 87,4% (Rp. 6,448,757,751,-dari Total Anggaran Rp. 7.237.021.098,-). Realisasi ini hanya mengalami sedikit penurunan dari realisasi tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 8,599,471,766,-dari Total Anggaran Rp. 9,578,451,226,-.

BAB IV – PENUTUP

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pemerintah Kota Lhokseumawe pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun masih ada kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa hampir semua sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 telah mencapai sasaran target.

Namun demikian problematika Perencanaan Pembangunan senantiasa berkembang sehingga merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang.
2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh *stakeholders*.

@5A D-F 5B = D9B; I ? I F 5B ? -B9F >5
 6585B D9F 9B 75B 55B D9A 65B; I B 5B '859F 5<
 ? CH5 @< C ? C9I A 5K 9
 H5 < I B '8888

BC	G5G5F5B' GHF5H9; -G	-B8=? 5HCF ? -B9F >5	H5F; 9H	F95@-G5G=	75D5=5B' ? -B9F >5
%	8		()	*
	0HQLQJNDWC	\DWHJRUL +DVLO (YDOXDVL	6\$. 83&	% %	
	\$NXQWDEL	-OLWDPY			
	.LQHUMD	GDC'FWHUEXNDDQ LQIRUPDVL	SXEQLN PHODQ	%L ZHEVLWH	
	.HXDQJDDQ	&DNXSDQ NRRUGLQDVL .HUMDVRN	NSXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		SHPEDQJXQDQ			
		&DNXSDQ SHQ\HGLDDQ GRNXPHQ	NSXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		SHQJHPEDQJDDQ ZLOD\DK VWUDWHJLV	FHSDW	WXPEXK	
		&DNXSDQ SHQ\HGLDDQ GRNXPHQ	NSXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		SHQJHPEDQJDDQ NRWD PHQHJQJDK	GDQ	EHVDU	
		&DNXSDQ IDVLLOLWDVL GDC	SHUHQFDQ	DNXPHQ	SHUHQFDQ
		SHUHQFDQ			
		&DNXSDQ SHQ\HGLDDQ GRNXPHQ	NSXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		SHPEDQJXQDQ GDHUDK			
		&DNXSDQ NRRUGLQDVL SHUHQFDQ	DNXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		HNRQRPL			
		&DNXSDQ NRRUGLQDVL SHUHQFDQ	DNXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		VRVLDO EXGD\			
		&DNXSDQ NRRUGLQDVL SHUHQFDQ	DNXPHQ	SHUHQFDQ	DNXPHQ
		SUDVDUDQD ZLOD\DK GDQ	WXPEHU	GD\	DODP
		&DNXSDQ SHQ\HGLDDQ ODSRUDQ	NSRUDQ	NSRUDQ	NSRUDQ
		SHQGDDQ SHPEDQJXQDQ GDHUDK			
		Hj[_UhdYwUlb?]bY^U1ffYU]g#FyWbU1 %88			%88